

BPK Berperan Aktif Perangi Korupsi



▲
I Nyoman Wara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. BPK berperan aktif dalam mencegah, mendeteksi, dan mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Auditor Utama Investigasi BPK I Nyoman Wara menjelaskan, ada tiga peran yang dijalankan BPK dalam upaya pemberantasan korupsi. "Ketiga peran itu adalah preventif, detektif, dan represif," kata I Nyoman Wara dalam podcast BPK yang ditayangkan di youtube BPK RI Official.

Terkait peran preventif, kata I Nyoman Wara, BPK membantu mencegah terjadinya korupsi. Hal tersebut salah satunya dilakukan BPK melalui pemeriksaan, yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) non-investigatif.

"BPK akan melakukan pemeriksaan investigatif apabila dalam pemeriksaan reguler yang dilakukan terdapat temuan-temuan yang berindikasi pidana atau berindikasi kerugian negara, maka akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan investigatif."

Auditor Utama Investigasi BPK, I Nyoman Wara

I Nyoman Wara menambahkan, dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan, BPK bisa menemukan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI). "Apakah sistem dari suatu entitas yang diperiksa ada yang lemah sehingga menimbulkan celah korupsi," ujar I Nyoman Wara.

Saat melakukan pemeriksaan tersebut, maka pemeriksa bisa memberikan rekomendasi perbaikan terhadap SPI sehingga bisa menutup celah-celah terjadinya kebocoran keuangan negara. "Di situ fungsi preventing atau pencegahan yang dilakukan BPK dalam upaya pemberantasan korupsi," kata I Nyoman Wara.

Kemudian dari sisi peran detektif, BPK akan melakukan pemeriksaan investigatif apabila dalam pemeriksaan reguler yang dilakukan terdapat temuan-temuan yang berindikasi pidana atau berindikasi kerugian negara, maka akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan investigatif.

Dalam tahap itu, akan diungkap unsur-unsur 5W2H atau what, who, where, when, why, how, dan how much. "Dalam mengungkap seberapa banyak kecurangan yang dilakukan di situlah peran detektif BPK muncul," ujarnya.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK akan diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) seperti kejaksaan, kepolisian, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). APH kemudian melakukan pendalaman. Apabila sudah terdapat dua alat bukti, maka kasus tersebut bisa ditingkatkan menjadi penyidikan dan penetapan tersangka.

Sedangkan terkait pendekatan represif, BPK berperan membantu proses penegakan hukum terhadap korupsi melalui penyampaian temuan berindikasi korupsi maupun hasil penghitungan kerugian negara kepada Aparat Penegak Hukum (APH).



FREEPIK